

PENGARUH KOMUNIKASI MASSA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA YANG PLURALISTIK*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Bagaimana pengaruh media komunikasi massa terhadap perubahan masyarakat, lebih jauh bagaimana perubahan itu dalam kaitan dengan masyarakat Indonesia yang pluralistik, merupakan persoalan kunci pembahasan ini. Media massa dipandang punya kedudukan strategis untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Dengan begitu media massa merupakan instrumen fungsi pragmatis dari pihak di luar media massa ataupun bagi pemilik media massa sendiri dalam menghadapi masyarakat. Pada sisi lain, keberadaan media massa dilihat dari sifat materinya yang terdiri atas fakta dan fiksi. Kedua macam materi ini selain memiliki perbedaan dalam hal sumbernya, juga memiliki konteks kemanfaatan yang berbeda bagi penerimanya. Materi faktual membawa penerimanya kepada alam interaksi sosial yang bersifat empiris dan obyektif, sementara materi fiksional ke alam psikologis yang sifatnya subyektif. Secara sederhana dapat disebut bahwa yang pertama mengajak orang untuk ke dunia luar, untuk terlibat pada alam sosial. Sedang yang kedua membawa orang ke dunia dalam (*inner world*), memasuki alam psikologisnya sendiri.

Secara akademik, keberadaan media massa dan masyarakat perlu dilihat secara bertimbang-balik. Untuk itu biasa digunakan landasan konseptual, setidaknya ada 2 pandangan yaitu apakah media membentuk (*moulder*) atau mempengaruhi masyarakat, ataukah sebaliknya sebagai cermin (*mirror*) atau dipengaruhi oleh realitas masyarakat. Dalam bahasa sederhana, apakah media massa menjadi penyebab rusaknya masyarakat, ataukah media massa hanyalah mencerminkan wajah codet masyarakat? Dua landasan ini menjadi titik tolak dari bangunan epistemogis dalam kajian media, yang mencakup ranah pengetahuan mengenai hubungan antara masyarakat nyata (*real*) dengan media, antara media dengan masyarakat *cyber*, dan antara masyarakat *real* dengan masyarakat *cyber* secara bertimbang-balik.

Pandangan pertama, bahwa media membentuk masyarakat bertolak dari landasan bersifat pragmatis sosial dengan teori stimulus – respons dalam behaviorisme. Teori media dalam landasan positivisme ini pun tidak bersifat mutlak, varian pengaruh media massa terdiri atas 3 varian, pertama: menimbulkan peniruan langsung (*copycat*), kedua: menyebabkan ketumpulan terhadap norma (*desensitisation*), dan ketiga: terbebas dari tekanan psikis (*catharsis*) bagi khalayak media massa. Selain itu dikenal pula kerangka konseptual tentang keberadaan media massa dengan landasan bersifat kultural, melalui perspektif kritis yang melihat pengaruh media adalah dalam menyampaikan dan memelihara dominasi ideologi borjuis, membentuk dan memelihara ideologi dominan atau nilai arus utama (*mainstream*) dalam masyarakat.

Pandangan kedua menempatkan media sebagai teks yang merepresentasikan makna, baik makna yang berasal dari realitas empiris maupun yang diciptakan oleh media. Dengan demikian realitas media dipandang sebagai bentukan makna yang berasal dari masyarakat, baik karena bersifat imperatif dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat, maupun berasal dari orientasi kultural pelaku media. Dari sini media dilihat pada satu sisi sebagai instrumen dari kekuasaan (ekonomi dan/atau politik) dengan memproduksi budaya dominan untuk pengendalian (dominasi

* Makalah disampaikan pada Konvensi Nasional Kesehatan Jiwa II “Our Nation at Risk – Kesehatan Jiwa Masyarakat, Kesehatan Jiwa Bangsa”, Jakarta 9 – 11 Oktober 2003

dan hegemoni) masyarakat, dan pada sisi lain dilihat sebagai institusi yang memiliki otonomi dan independensi dalam memproduksi budaya dalam masyarakat.

Pandangan lain dengan determinasi teknologi, keberadaan media komunikasi massa dilihat sebagai fenomena yang dibentuk oleh perkembangan masyarakat. Teknologi mengubah konfigurasi masyarakat, mulai dari masyarakat agraris, industrial sampai ke masyarakat informasi. Dalam perubahan tersebut teknologi komunikasi berkembang sebagai upaya manusia untuk mengisi pola-pola hubungan dalam setiap konfigurasi baru. Perkembangan teknologi yang mempengaruhi kegiatan komunikasi, pertaliannya dapat dilihat pada dua tingkat, pertama secara struktural, yaitu faktor teknologi yang mengubah struktur masyarakat, untuk kemudian membawa implikasi dalam perubahan struktur moda komunikasi. Kedua, perubahan moda komunikasi secara kultural membawa implikasi pula pada perubahan cara-cara pemanfaatan informasi dalam masyarakat. Dengan begitu determinasi teknologi dalam konteks komunikasi dapat dilihat dalam urutan berpikir: dari perubahan struktur masyarakat, struktur moda komunikasi dalam masyarakat, dan cara pemanfaatan informasi.

Selain itu ada pula pandangan dengan urutan sebaliknya: dari pemanfaatan informasi, membawa perubahan masyarakat, dan untuk kemudian mempengaruhi perkembangan teknologi. Pandangan ini menempatkan media massa dapat membentuk masyarakat melalui realitas psikhis dan realitas empiris sehingga terdapat daya kreatif person maupun kolektifitas. Dengan kapabilitas dan daya kreatif secara personal atau kolektif dapat melahirkan (*invention*) dan memperkembangkan (*innovation*) teknologi dalam masyarakat.

(2)

Karakteristik media massa dapat ditelusuri dari masyarakat yang menjadi ruang hidupnya. Secara konvensional masyarakat dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu dalam kehidupan sosial/empiris dan kehidupan kultural/simbolik. Karenanya dikenal masyarakat empiris yang dilihat dari interaksi sosial dalam konteks ekonomi dan politik. Sedang masyarakat kultural/simbolik dibedakan atas dua macam, bersifat statis yaitu komunitas warga yang memperoleh warisan (*heritage*) makna (*meaning*) untuk kehidupan sosialnya, dan bersifat dinamis yaitu komunitas warga yang memproduksi makna. baik revitalisasi makna lama maupun baru untuk kehidupan yang lebih baik.

Secara paralel, kegiatan komunikasi berlangsung dalam kaitan dengan kenyataan atau realitas sosial, yang dapat dipilah antara realitas keras (*hard reality*) dan realitas lunak (*soft reality*). Realitas keras adalah kehidupan bersifat empiris dalam interaksi manusia, bersifat fisik dan materil. Sedangkan kenyataan lunak adalah kehidupan dalam alam pikiran, penghayatan simbol dan nilai-nilai. Manakala kedua macam realitas ini masuk ke media, dikenal sebagai realitas media. Dari sini dikenal informasi keras dan informasi lunak.

Realitas keras merupakan dunia yang tidak terelakkan, dijalani manusia baik secara institusional maupun individual. Sementara manusia sering mengabaikan realitas lunak, sebab dunia semacam ini hanya relevan saat kehidupan ingin diberi lebih bermakna. Di dalam masing-masing dunia ini berlangsung kegiatan komunikasi berupa pemanfaatan informasi. Informasi dari realitas keras memiliki nilai pragmatis tinggi, bernilai guna yang langsung terpaku dalam kehidupan sosial yang bersifat empiris. Sementara informasi lunak berfungsi untuk memenuhi dorongan psikhis.

Dengan cara lain realitas biasa pula dilihat dalam 3 kategori yaitu realitas empiris, realitas psikhis, dan realitas media. Realitas empiris terjadi dalam interaksi sosial bersifat obyektif,

sedang realitas psikhis yaitu ranah (*domain*) berkaitan dengan alam kognisi dan afeksi bersifat subyektif, dan kedua realitas inilah mewujudkan masyarakat (*society*). Dinamika masyarakat pada dasarnya merupakan proses obyektivikasi dan subyektivikasi yang terwujud sebagai ranah empiris dan psikhis. Sedangkan realitas media pada hakikatnya adalah sebagai refleksi dari masyarakat dengan realitas empiris dan psikhis.

Sebagai refleksi realitas empiris, proses pengwujudan realitas media sebagai materi faktual, mengikuti kaidah epistemologi (akademik dan jurnalisme untuk kebenaran) yang berada dalam landasan kebebasan akademik dan kebebasan pers. Sedang sebagai refleksi realitas psikhis, realitas media sebagai materi fiksional, diwujudkan melalui kaidah estetika, berada dalam landasan kebebasan ekspresi. Lingkup dan batasan dari kedua kebebasan ini berada dalam landasan acuan nilai bersama (*shared values*) dalam suatu masyarakat. Krisis epistemologi dan estetika dalam suatu masyarakat dapat terjadi akibat ketidak-jelasan acuan nilai (anomali) di satu pihak, dan kelemahan metodologi pelaku profesional di pihak lain. Krisis ini akan mempengaruhi realitas media baik dalam dimensi kebenaran maupun estetika. Dengan kata lain, “carut-marut” kegiatan akademik (di antaranya kekerasan dalam pengajaran, plagiarisme penelitian/karya akademik) serta keberadaan media massa yang dianggap “kebablasan” (dengan limpahan materi kekerasan dan pornografi serta sewenang-wenang meng”intruding” kehidupan *privacy*) pada dasarnya bersumber dari krisis epistemologis dan estetika ini.

Selain itu, dalam perkembangan teknologi komunikasi, realitas media melahirkan bentuk kehidupan baru, dikenal melalui realitas virtual atau *cyber*. Dengan demikian kompleksitas masyarakat perlu dilihat pada realitas masyarakat bersifat *real* yang terbentuk atas interaksi manusia dalam proses obyektifikasi dan subyektifikasi, realitas masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna simbolik, dan realitas masyarakat *cyber* (*cyber society*) yang terbentuk oleh penggunaan media berbasis telekomunikasi dan informasi multimedia (tele-informatika).

(3)

Pandangan bahwa media massa kuat mempengaruhi atau membentuk masyarakat, dapat dikritisi dari pangkalnya yang mengabaikan pandangan determinasi teknologi mengenai perubahan masyarakat. Perubahan besar dalam kehidupan masyarakat berasal dari penemuan dan pengembang-luasan teknologi. Karenanya teknologi tidak meloncat langsung dalam perubahan struktur moda komunikasi dalam masyarakat melainkan mengubah masyarakat lebih dulu. Seperti sering dikutip dari Karl Marx, “*the windmill gives you society with feudal lord; the steam-mill, society with the industrial capitalist.*” Adanya kincir angin melahirkan tuan tanah, hadirnya mesin uap memunculkan kapitalis industri. Perubahan masyarakat membawa implikasi pada tuntutan pada cara-cara bertindak dalam kehidupan sosial-ekonomi, untuk kemudian mengubah konfigurasi masyarakat dalam sosial-politik. Baru dari sini kemudian lahir teknologi sebagai jawaban atas tuntutan komunikasi, untuk berikutnya melahirkan moda komunikasi dalam masyarakat.

Dengan begitu sumber dari dinamika bagi moda komunikasi adalah struktur sosial (ekonomi dan politik) yang menjadi ruang baginya. Dalam pandangan ini ranah teknologi komunikasi tidak bersifat otonom, tetapi dibentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial. Pada pihak lain, kedudukan manusia pada tataran struktur sosial membawa konsekuensi dalam merespon lingkup kenyataan, baik struktur sosial maupun moda komunikasi.

Struktur moda komunikasi akan memaksa manusia Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan komunikasi. Pada tahap dasar, setiap orang dipaksa untuk

melek media komunikasi (*media literacy*) yang berbasis pada teknologi sebagai syarat untuk bisa menjadi konsumen informasi. Setiap moda komunikasi memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain seperti perbedaan bentuk simbolik yang digunakan menyebabkan masing-masing media membawa *bias* intelektual dan emosional yang berbeda, atau perbedaan aksesibilitas dan kecepatan informasi akan mengakibatkan perbedaan *bias* politik, atau perbedaan posisi dalam menghadapi media komunikasi menyebabkan *bias* sosial yang berbeda pula.

(4)

Konteks keberadaan manusia masa kini pada dasarnya dalam 3 dimensi realitas, empiris, simbolik dan virtual. Dengan demikian setiap manusia pada dasarnya akan menjadi warga dari 3 macam masyarakat, yakni masyarakat empiris, masyarakat simbolik dan masyarakat *cyber*. Ketiga dimensi ini berada dalam kompleksitas moda komunikasi yang berbasis pada teknologi. Pengenalan atas kondisi realitas di Indonesia dapat dilakukan melalui moda komunikasi yang mendukung proses interaksi sosial di satu sisi, dan pemaknaan dunia simbolik di sisi lainnya, baik dalam dimensi realitas empiris, simbolik dan virtual. Inilah yang menjadi konteks dari kekinian manusia Indonesia.

Keberadaan manusia Indonesia pada hakikatnya menghadirkan diri sebagai warga dari masyarakat yang secara sadar atau tidak, mendefinisikan dirinya di satu pihak, dan mendefinisikan realitas yang melingkupinya. Bertolak dari pendefinisian ini permasalahan diidentifikasi dan respon dilakukan. Sebagai warga masyarakat empiris seseorang mendefinisikan diri sebagai konsumen dalam ekonomi pasar, sebagai pengguna atau klien pelayanan publik dalam politik negara. Sebagai warga masyarakat simbolik seseorang mendefinisikan diri sebagai orang Jawa, Dayak, Madura atau lainnya. Tetapi sebagai warga dari masyarakat *cyber*, manusia Indonesia dapat menjadi dirinya sebagaimana dalam masyarakat empiris dan simbolik, atau sepenuhnya sebagai warga masyarakat virtual yang didefinisikan secara teknologis. Sebagai manusia semacam ini, parameter kedinian adalah kemampuan sebagai *user* atau *client*, baik sebagai produsen maupun konsumen. Sejauh mana realitas masyarakat memberi kepuasan atau sebaliknya menimbulkan kekecewaan baginya.

Dengan begitu dapat dipahami bahwa setiap orang pada dasarnya menjadi bagian dari realitas masyarakat dengan 3 dimensi, kesertaan (*sharing*) secara tepat di dalamnya menandai kehidupan sosial dan kulturalnya. Pertanyaan kunci adalah bagaimana kesertaan seseorang dalam menjalani kehidupannya di ketiga dimensi realitas. Kedudukan seseorang ditandai sebagai produsen (sebagai sumberdaya produktivitas) atau konsumen (sumberdaya pengguna) dalam setiap kegiatan bernilai baik pragmatis maupun kultural.

Di masa kini, pengkaji ilmu sosial (termasuk humaniora) pada dasarnya menghadapi realitas masyarakat dalam 3 macam dimensi fenomenal yaitu masyarakat dengan kehidupan nyata (*real*), masyarakat simbolik, dan masyarakat virtual/*cyber*. Pertanyaan yang menggugat adalah pertalian di antara masyarakat *real*, simbolik dan *cyber* yang menjadi ruang bagi seseorang Indonesia. Artinya, sejauh mana seseorang yang mendefinisikan dirinya sebagai manusia Indonesia, berbarengan membayangkan keindonesian dalam ketiga macam realitas masyarakat tersebut. Interkontekstual ketiga macam realitas inilah sebagai sumber dan sasaran bagi media massa. Realitas media pada dasarnya bersumber dari realitas empiris dan realitas psikhis berasal dari masyarakat,

Pada sisi lain, masyarakat Indonesia dapat difokuskan pada struktur sosial berupa disparitas penduduknya dalam kesertaan dalam setiap realitas. Disparitas dalam masyarakat

empiris secara agregat misalnya ternampak dari jumlah orang produktif dan penganggur, dan kemiskinan merupakan sumber disparitas dari sumberdaya pengguna. Sedangkan dalam masyarakat simbolik adalah dari kesertaan dalam makna kultural yang mencerahkan atau sebaliknya yang memerosotkan. Begitu juga kesertaan seseorang dalam masyarakat *cyber*, seberapa banyak yang dapat mengambil kemanfaatan secara produktif, atau sebaliknya menjadi produsen atau konsumen materi sampah, atau bahkan kriminal sebagai *carder*. Ketidak-pasan atau ketidak-sesuaian (*mis-fit*) diri dalam setiap realitas ini dapat menjadi sumber krisis pada problem personal, lebih jauh pada tataran agregat kolektif sebagai problem sosial.

(5)

Pentingnya kesadaran dan apresiasi pengelola media massa terhadap kondisi ruang publik di Indonesia pada dasarnya guna menempatkan media massa sebagai institusi sosial yang bertolak dari kondisi masyarakat sebagai habitatnya. Dengan begitu habitat bagi media massa tidak dilihat dalam konteks pasar yang akan menghidupi dan memperbesar modal bisnis media. Media massa berinteraksi dengan ruang sosial yang menjadi habitatnya, dalam keberadaannya sebagai cermin atau pembentuk masyarakat. Sebagai cermin merefleksikan fakta-fakta dalam perspektif yang bertolak dari kondisi ruang publik, sementara sebagai pembentuk maka media massa berorientasi etis dalam memproyeksikan masyarakat dalam konteks kultural.

Masalah mendasar yang perlu dihayati oleh pengelola media massa di Indonesia adalah kondisi multi-kultural dalam ruang sosialnya. Kondisi multi-kultural merupakan fokus penting di berbagai negara, sehingga pemerintahnya masing-masing memiliki kebijakan yang serius dalam strategi kultural. Untuk itu dikenal negara multi-bangsa (*multi-nation states*) atau negara banyak-suku (*poly-ethnic states*) mengingat varian komposisi warga masyarakatnya. Varian ini dapat atas dasar pengelompokan pendatang (imigran), agama, penduduk asli, dalam komposisi minoritas dan mayoritas. Pendekatan multi-kultural berfokus pada perlindungan atas hak kultural komunitas minoritas, dengan menghindari dominasi kultural dari komunitas mayoritas.

Sudah barang tentu kesadaran tentang kondisi multi-kultural ini tidak semata-mata berlaku bagi orang media saja. Media massa berurusan dengan informasi yang ditarik dari dan ditujukan ke ruang sosial. Sementara dalam skala makro diperlukan strategi yang diwujudkan sebagai kebijakan negara dengan pendekatan multi-kultural. Baru dari sini kemudian pendekatan multi-kultural menjadi dasar orientasi bagi institusi-institusi sosial, seperti institusi pendidikan, bisnis, partai politik, dan lainnya. Dengan kata lain, pendekatan multi-kultural menjadi urusan bersama yang di dalamnya media massa ikut ambil bagian. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini sangat krusial karena tidak adanya strategi dasar dengan pendekatan multi-kultural dalam kebijakan negara.

Kondisi multi-kultural ini menyebabkan suatu komunitas negara menjadi rentan (*vulnerable*) dengan adanya potensi konflik. Konflik muncul dan mendominasi ruang publik manakala berlangsung anomali, yaitu tiadanya acuan nilai bersama dalam masyarakat multi-kultur. Ruang publik yang didominasi oleh sektarianisme agama mayoritas di Indonesia misalnya, merupakan anomali yang sulit dipahami. Lazimnya, sektarianisme lahir dari suatu komunitas agama, yaitu kelompok kecil yang menyempal dari induknya, sementara komunitas mayoritas akan berkecenderungan inklusif. Dengan kata lain, basis suatu sektarian adalah eksklusifisme komunitas lebih kecil yang berhadapan dengan komunitas lebih besar. Sering terjadi sektarian agama muncul di Indonesia dengan membangun jamaah sendiri melalui tempat ibadah yang terpisah dari komunitas lainnya dengan menganggap komunitas lainnya tidak syah peribadatannya. Secara sosiologis fenomena ini dipandang normal. Berbeda halnya jika suatu

agama mayoritas menciptakan jurang sosial dengan komunitas agama lainnya, maka telah menjadi sektarian dalam basis negara multi-bangsa.

Sektarian lainnya bersifat sekuler, mewujud melalui ekslusifisme komunitas suku yang menyempal dari negara banyak-suku. Sektarian semacam ini dapat dipahami karena negara bangsa (*nation state*) Indonesia terbentuk melalui imajinasi kolektif atas dasar geo-politik dan kesadaran senasib dalam konteks kesejarahan yang diperoleh secara empiris. Kesadaran senasib ini mungkin tidak menjadi inspirasi lagi bagi generasi berikutnya karena tidak memiliki pengalaman empiris yang sama. Sementara internalisasi makna kesejarahan telah gagal akibat pola sosialisasi yang keliru, antara lain dengan mengagung-agungkan militerisme dalam penegakan dan pembangunan negara bangsa. Dalam pada itu berbagai komunitas kultural suku mengalami marginalisasi dalam dominasi kultural komunitas suku yang lebih besar (dalam hal ini Jawa) yang diambil alih sebagai kultur negara. Sementara perekat bagi berbagai komunitas banyak-suku dalam negara, hanyalah birokrasi negara yang menjalankan militerisme, bukan kesadaran senasib dan kesejarahan. Dengan kata lain, negara mengadopsi kultur dari komunitas mayoritas, semenata kekuasaan dijalankan dengan kultur militer, sehingga suku-suku lain mengalami ketertindasan kultural.

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kekerasan yang dominan di ruang publik dapat dilihat sebagai anomali sosial. Sebab dalam kehidupan sosial yang normal, tertib sosial pada dasarnya diwujudkan melalui rasionalitas dan hukum yang adil. Jika kedua hal ini tidak menjadi basis dalam kehidupan warga, dengan sendirinya ruang publik menjadi ajang bagi kekuatan fisik. Semula ruang publik sepenuhnya dalam kendali kekuatan fisik negara dengan peran militer yang merasuk ke seluruh aspek kehidupan publik di antero wilayah negara. Kini ruang publik menjadi ajang perebutan dominasi oleh berbagai kekuatan sosial berupa komunalisme, baik atas dasar kelompok massa spontan (*mob*), maupun berbasis agama dan suku. Pada kesempatan lain basis komunalisme massa ini adalah organisasi politik.

Media massa sebagai institusi sosial berada di tengah kancang perebutan dominasi ini. Orientasi kebijakan pemberitaan akan tercermin dari pemilihan sudut pandang konflik atau damai dengan menempatkannya dalam perspektif multi-kultural. Dari sini keberadaan media massa dapat dilihat dalam konteks kerangka keutuhan negara multi-bangsa atau banyak-suku, apakah media massa hanya akan menjadi agensi bisnis yang memanfaatkan situasi anomali di ruang publik tanpa memperdulikan kehancuran suatu komunitas bangsa. Ataukah media massa akan menjalankan fungsi sebagai institusi sosial dengan pendekatan multi-kultural dalam *frame* negara bangsa. Untuk itu kaum profesional media massa perlu menjawabnya melalui penyajian informasinya baik faktual maupun fiksional.